

Studi Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

by Sukanto Sukanto

Submission date: 18-Jan-2025 04:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2565255616

File name: STUDI_MANFAAT_DANA_DESA_DALAM_PERCEPATAN_PEMBANGUNAN_1.pdf (1.29M)

Word count: 9928

Character count: 59270

**JURNAL INTEGRITAS SERASAN SEKUNDANG
(JOURNAL INTEGRATION SERASAN SEKUNDANG)**

p-ISSN e-ISSN

Vol, 02, No. 01, 2020

ABSTRAK

**STUDI MANFAAT DANA DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**

Tarmizi Ismail¹, Sukiani¹, Azwardi², Sukanto², Abdul Bashir², Heidi Yurismasari¹

¹Balibangda Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan studi ini mengidentifikasi Manfaat Dana Desa Dalam Percepatan Pembangunan Dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengungkap fenomena kemiskinan dan menganalisis akar kemiskinan. Hasil temuan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap alokasi dana desa tertinggi di bidang pembangunan sosial dengan nilai rata-rata sebesar (83,70%) dan menganggap pembangunan bidang sosial bermanfaat sebanyak (85,87%), disusul kegiatan bidang pembangunan fisik sebesar (72,46%) dengan kebermanfaatannya sebesar (78,26%), bidang ekonomi dan kesra masing-masing sebesar (58,28%) dan (42,61%). Masyarakat menganggap kedua bidang tersebut bermanfaat sebanyak (62,17%) dan (28,26%). Selain itu, manfaat Dana desa menurut dimensi dalam masing-masing bidang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi pada pembangunan bidang infrastruktur (jalan, jembatan, selokan, PAMSIMAS, Sumur Bor) sebanyak (89,13%) dan menganggap infrastruktur jalan bermanfaat sebanyak (95,65%). Selain itu, penggunaan Dana desa telah mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat sehingga dalam jangka panjang dapat mereduksi tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Dana Desa, Pembangunan, Kemiskinan

ABSTRACT

The purpose of the study is identifying the Benefits of Village Funds in the Acceleration of Development and Poverty Alleviation in Muara Enim Regency. This research uses qualitative and quantitative approaches to uncover the phenomenon of poverty and analyze the roots of poverty. The findings show that the highest level of community satisfaction with the allocation of village funds in the field of social development with an average value of (83.70%) and considers the development of the social sector beneficial as much as (85.87%), followed by physical development activities of (72.46%) with usefulness of (78.26%), in the economic and social sector respectively (58.28%) and (42.61%). The community considers these two fields beneficial as much as (62.17%) and (28.26%). In addition, the benefits of village funds according to the dimensions in each field show the highest level of community satisfaction in the development of infrastructure (roads, bridges, gutters, PAMSIMAS, Drilling Wells) as much as (89.13%) and considers road infrastructure as useful as (95.65%). In addition, the use of village funds has been able to increase time and cost efficiency for the community so that in the long run it can reduce poverty levels.

Keywords: Village Funds, Development, Poverty

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan ekonomi di daerah adalah suatu kegiatan mengelola sumberdaya daerah dengan melibatkan segenap pemerintah daerah dan juga seluruh komponen masyarakat dengan cara menjalin sebuah hubungan kerja sama yang baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kegiatan perekonomian yang berkembang untuk kesejahteraan rakyat (Arsyad, 1999 dalam Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi di daerah bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga pelaksanaannya berdasarkan suatu rencana dan dilakukan secara terus menerus.

Salah satu tujuan pembangunan adalah mengatasi kemiskinan yang ada di daerah-daerah. Terkait dengan masalah kemiskinan, sebagai negara kepulauan menurut data Badan Pusat Statistik (2017) kemiskinan diidentikkan dengan kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Penyebab adanya kemiskinan menurut Kuncoro (2004) antara lain: (1) Secara makro, ¹ miskin muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah; (2) kemiskinan muncul akibat dari adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, upahnya pun

rendah; (3) kemiskinan muncul disebabkan oleh perbedaan akses dan modal.

Kemiskinan yang terjadi menimbulkan permasalahan lain yaitu: *pertama*, pengangguran, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini berdampak pada tidak adanya pendapatan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya, kekurangan nutrisi dan kesehatan. *Kedua*, kriminalitas, kesulitan mencari nafkah mengakibatkan masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas (perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjam-bretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan). Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup.

Ketiga, putus sekolah dan kesempatan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tidak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan masyarakat luas dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. *Keempat*, sulitnya mendapatkan kesehatan yang layak, karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi dengan biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

Kelima, buruknya generasi penerus, jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidur di jalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan terhadap generasi penerus merupakan dampak jangka panjang karena anak-anak seharusnya

mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak kedalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.

Pada Tabel 1 menunjukkan perkembangan tingkatan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan di Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2018. Pada periode tersebut terjadi penurunan tingkat kemiskinan, bila pada tahun 2013 sebesar 11,47 persen menurun menjadi 9,66 persen pada tahun 2018. Kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan tingkat kemiskinan masih di atas satu digit sedangkan kemiskinan di wilayah perkotaan hanya tersisa 7%.

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan antar kota-desa, hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama ini desa ditempatkan sebagai objek pembangunan, namun sejak lahirnya Undang-Undang tersebut desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Konsekuensi dari munculnya undang-undang tentang desa adalah kebijakan Dana Desa yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan dan kemiskinan desa.

Keseriusan pemerintah tercermin dari pengalokasian Dana Desa yang meningkat signifikan tiap tahun. Pada tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 20,77 triliun, meningkat menjadi Rp.46,98 triliun pada tahun 2016, tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 60 triliun. Total alokasi Dana Desa sebesar Rp. 187,75 triliun selama 4 tahun diharapkan dapat memberi manfaat yang optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mengurangi kesenjangan, mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan perekonomian desa.

UU Desa mengamanatkan agar anggaran desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun saat ini 90 % Dana desa dibagi rata

sebagai alokasi dasar dan 10 persen dibagi berdasarkan empat variabel tersebut di atas.

Tabel 1. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia periode tahun 2013 – 2018

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah Perdesaan + Perkotaan
2013	8,52	14,42	11,47
2014	8,16	13,76	10,96
2015	8,34	14,47	11,25
2016	8,22	14,09	11,13
2017	7,72	13,93	10,12
2018*	7,02	13,20	9,66

*) September 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya Dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa, namun hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mendulang kritikan karena

program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Undang-Undang Desa mengatakan Dana desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasayarakatan. Lebih lanjut dalam Pasal 74 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, pasal 78 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Jauh sebelum lahirnya Undang-Undang desa, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 mengatur agar desa memprioritaskan pelaksanaan program kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan penekanan pada:

- Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan;
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;

- Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Implementasi Dana desa di lapangan menunjukkan beberapa permasalahan umum dihadapi desa yaitu:

- Harga rata-rata sarana prasarana desa yang dibangun jauh lebih mahal karena mengacu dengan harga perkiraan sendiri di kabupaten (HPS) yang ditetapkan basis kabupaten, di mana desa tidak melalui survei, dan lebih sering melakukan pembelian langsung.
- Pendamping desa memiliki kompetensi teknis yang minim, atau pembangunan sarana prasarana dilakukan tanpa bimbingan dan pengawasan oleh pendamping desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Pelatihan untuk aspek teknis sarana prasarana desa yang minim. Akibatnya kualitas sarana prasarana yang dibangun kurang memadai baik dari aspek teknis maupun kemanfaatan.
- Aspek pemeliharaan dan kemanfaatan kurang maksimal karena sarana prasarana desa yang dibangun bukan merupakan prioritas utama desa/warga desa, tapi lebih cenderung kepentingan para elite desa/ perangkat desa.
- Evaluasi penggunaan Dana Desa

Persoalan lain berkaitan dengan penggunaan Dana desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mewajibkan bendahara desa memungut pajak PPH dan pajak lainnya bagi belanja desa. Ketentuan ini dianggap oleh desa telah mempersulit mereka melakukan swakelola, baik dalam pengadaan barang maupun membayar upah kepada masyarakat desa yang terlibat dalam swakelola. Hal ini disebabkan hampir semua penyedia barang dan jasa di desa tidak memiliki nomor wajib pajak (baik PPH maupun pajak usaha). Kondisi ini berimplikasi pada tidak optimalnya penyerapan sumber daya desa dalam mendukung pembangunan desa, padahal swakelola merupakan inti dari penggunaan Dana desa. Dalam Musyawarah APDESI, Presiden mengemukakan Dana desa harusnya 'diputar' di desa baik untuk beli barang, misalnya kayu dan pasir dari masyarakat maupun untuk tenaga kerja yang berasal dari desa.

Tabel 2. Distribusi Penggunaan Dana Desa tahun 2018

No	Penggunaan	Persentase (%)
1	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik	83,9
2	Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	6,5
3	Kegiatan pemerintahan	5,7
4	Kegiatan sosial kemasyarakatan	3,8
5	Lain-lain	0,1

Sumber: Kemendesa PDTT, 2019

Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa: (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan belanja daerah. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Aturan tentang sumber pendapatan desa di atas mengatur secara jelas sumber pendapatan dan urusan serta sumber pembiayaannya yang membedakan urusan yang menjadi kewenangan penuh desa serta urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan di desa.

Pasal 96 memperjelas posisi alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk desa tersebut sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. (4)

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota. Dengan demikian, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari APBN dan APBD.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. Luas wilayah ± 7.483,06 Km².

Jumlah penduduk sebesar 600.398 ribu jiwa, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor kehutanan, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian, yang tersebar di 20 Kecamatan, 245 Desa dan 10 Kelurahan. Sebagai wilayah yang menopang sektor perkebunan dan industri, maka peran pemerintah sangat penting dalam mengkaji berbagai peluang dan tantangan.

Tabel 3. Rincian Dana desa untuk Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 (ribu rupiah)

Alokasi Dana Desa	Jumlah
Alokasi dasar per desa	616.345
Alokasi Dasar	151.004.525
Alokasi Afirmasi	16.542.645
Alokasi Formula	40.614.004
Total	208.161.174

Sumber: Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Tabel 3 menunjukkan desa berdasarkan alokasi, dimana alokasi dasar lebih dominan. Total Dana Desa sebesar Rp. 208.161.174 ribu, namun di sisi lain tingkat kemiskinan di Kabupaten Muara Enim masih tergolong cukup tinggi, pada tahun 2018 angka kemiskinan sebesar 12,56%. Berdasarkan arguisa konsep dan kondisi empirik tersebut, maka kajian manfaat Dana desa dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan untuk pembangunan

Kabupaten Muara Enim di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan mengungkap fenomena kemiskinan dan analisis akar kemiskinan di Kabupaten Muara Enim melalui pola kehidupan masyarakat dan tipologi desa. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengungkapkan data yang bersifat eksplorasi, generalisasi dari analisis akumulasi data besar, serta bertujuan untuk mencari atau menerangkan hubungan, dan menarik kesimpulan hipotesis.

Merujuk pada keluaran yang ingin dicapai, dibutuhkan dukungan kelengkapan dan akurasi data tentang kondisi permasalahan, tantangan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan dan harapan pada kajian ini. Untuk itu data kebutuhan, data lapangan perlu diorganisasikan dan dianalisis, baik melalui data primer maupun data sekunder. Hasil analisis menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi di masa yang akan datang.

2.1 Metode Pengumpulan Data

Metode Kajian yang dilakukan untuk mengungkap data empirik di lapangan antara lain:

1. Wawancara, dilakukan untuk menggali informasi mengenai
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Muara Enim saat ini
 - b. Kebijakan pendistribusian dana desa menurut wilayah
 - c. Permasalahan dana desa dan pengentasan kemiskinan
 - d. Alternatif pemecahan masalah dalam ruang lingkup dana desa, percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim
2. FGD (*Focus Group Discussion*): Untuk menghimpun berbagai informasi mengenai dana desa dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim, perlu menggali berbagai permasalahan, alternatif pemecahan masalah dan langkah-langkah strategi yang

harus dilakukan. FGD (*Focus Group Discussion*) melibatkan berbagai pihak stakeholder OPD di Kabupaten Muara Enim.

3. Dokumentasi; kegiatan ini menghimpun beberapa dokumen yang dapat mendukung pengelolaan data empirik. Dokumen ini dapat diperoleh dari data kajian sebelumnya, data statistika yang dimiliki pemerintah daerah, laporan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
4. Observasi; kegiatan ini dilakukan untuk pola kehidupan masyarakat secara langsung. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung bersama-sama dengan masyarakat serta pemerintah, peneliti akan melihat aktivitas secara alami yang dilaksanakan oleh masyarakat serta didokumentasikan, untuk mendukung laporan kajian kegiatan.

2.2 Metode Analisis

Pengaruh Dana desa terhadap kemiskinan diukur menggunakan metode *Geographically Weighted Regression* (GWR). Pemilihan metode ini dilakukan dengan memperhitungkan sebaran kemiskinan dan Dana desa setiap wilayah yang berbeda. Adapun metode GWR dirumuskan sebagai berikut:

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i)x_{ik} + \varepsilon_i \quad (1)$$

- 4
- y_i : nilai observasi variabel respon pada desa ke- i ($i = 1, 2, \dots, n$)
 - x_{ik} : nilai observasi variabel prediktor k pada desa ke- i ($i = 1, 2, \dots, 255$)
 - (u_i, v_i) : titik koordinat (lintang bujur) pada suatu desa ke- i .
 - $\beta_k(u_i, v_i)$: parameter regresi untuk setiap desa ke- i
 - ε_i : error yang diasumsikan IIDN (identik, independen, dan berdistribusi normal) dengan mean nol dan varians konstan σ^2

Identifikasi kemiskinan desa di Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan model GWR yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0(u_i, v_i) + \beta_1(u_i, v_i)X_1 + \beta_2(u_i, v_i)X_2 + \varepsilon \quad (2)$$

Berdasarkan formula pada persamaan (2), maka analisis model GWR untuk melihat pola spasial kemiskinan di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$Pov_i = \beta_0(ui, vi) + \beta_{1i}(ui, vi)DDPPM_i + \beta_{2i}(ui, vi)DDPMD_i + \varepsilon_i \quad (3)$$

Dimana:

Pov_i = Jumlah penduduk miskin di desa ke- i ($i = 1, 2, \dots, 255$)

(u_i, v_i) = Titik koordinat (lintang bujur) pada desa i

$\beta_i(u_i, v_i)$ = Parameter regresi untuk setiap desa ke- i

ε_i = *error* yang diasumsikan IIDN (identik, independen, dan berdistribusi normal dengan *mean nol* dan varians konstan σ^2)

DDPM _{i} = Dana desa untuk pembangunan fisik (rupiah) di desa ke- i

DDPMD _{i} = Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa ke- i

Pengaruh Dana desa juga dihitung pada level kecamatan dengan metode yang sama seperti persamaan (3) sehingga akan terlihat di kecamatan mana saja dana desa berpengaruh lebih kuat.

Di samping itu, untuk manfaat Dana desa dalam pengembangan wilayah dilakukan analisis deskriptif berupa tabel, dan gambar dengan komparasi data IDM tahun 2014 dan 2018. Selain itu, penguatan analisis dilakukan dengan mengambil data lapang dengan metode purposif. Kecamatan yang menjadi sampel dengan pertimbangan; 1) kecamatan yang dominan desanya mengalami perubahan status desa; 2) kecamatan yang tidak banyak desa yang mengalami perubahan status desa; 3) kecamatan yang mewakili daratan dan wilayah perairan. Ketiga kriteria tersebut memunculkan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Rambang dan Kecamatan Gelumbang. Setelah kecamatan dipilih kemudian dilakukan pemilihan desa yang menjadi sampel. Kecamatan Gelumbang diwakili Desa Gumay dan Kecamatan Rambang di ambil Desa Kencana Mulya.

Jumlah responden yang diambil sebanyak 46 orang penduduk yang terkategori miskin dengan menggunakan *random sampling*. Selain

itu, juga dilakukan wawancara dengan kepala desa dan perangkat desan, hal ini penting dilakukan untuk menggali informasi mengenai penggunaan Dana desa. Data yang terkumpul dari respon kemudian diidentifikasi, dikelompokkan dan dianalisis dalam bentuk gambar maupun tabel.

B.2 Tipologi Klassen

Pendekatan tipologi Klassen digunakan untuk memetakan wilayah yang memerlukan prioritas dalam pengentasan wilayah. Pemetaan menggunakan jumlah dan persentase penduduk miskin. Wilayah yang terklasifikasi dalam jumlah dan persentase kemiskinan menjadi prioritas utama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah pusat dan daerah telah berkomitmen menjadikan kemiskinan sebagai agenda utama yang harus diatasi. Hal ini tertuang dalam dokumen RPJMN, RPJMD provinsi maupun kabupaten. Namun hasil yang dicapai relatif melambat, oleh karena itu perlu diketahui akar masalah kemiskinan yang ada. Pada bagian ini dijelaskan akar masalah kemiskinan di perdesaan, pengaruh Dana desa dan manfaat dana desa yang ada di Kabupaten Muara Enim.

A. Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Desa

Tipologi desa berdasarkan nilai IDM menunjukkan perkembangan yang lebih baik, hal ini tercermin dari peningkatan status desa. Adapun kriteria tipologi desa sebagai berikut:

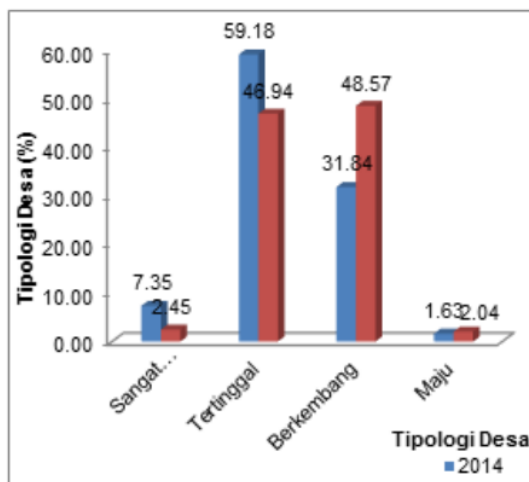
1. Desa Sangat Tertinggal : $\leq 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Adapun aspek yang dinilai mencakup aspek Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Lingkungan, ketiga dimensi menjadi ukuran dalam pengklasifikasian desa. Oleh karena itu tidak jarang desa memiliki potensi ekonomi yang baik, dan jalan yang relatif baik masih tergolong wilayah tertinggal bahkan sangat tertinggal. Data publikasi Kemendesa pada tahun 2014 sebanyak 7,35 persen desa di Kabupaten Muara Enim masih tergolong sangat tertinggal, memasuki tahun 2018 desa sangat tertinggal

berkurang menjadi 2,45 persen. Demikian juga desa yang terkategori tertinggal mengalami penurunan sebanyak 12,24 persen dari 59,18 persen di tahun 2014 menjadi 46,94 persen di tahun 2018. Penurunan tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim lambat laun telah mampu mengurangi jumlah desa yang sangat tertinggal. Di sisi lain, desa berkembang meningkat cukup tajam yaitu sebesar 16,73 persen, pada tahun 2014 desa berkembang sebanyak 31,84 persen meningkat menjadi 48,57 persen. Disamping itu, peningkatan status desa juga terjadi pada klasifikasi desa maju, bila tahun 2014 sebanyak 1,63 persen meningkat menjadi 2,04 persen di tahun 2018 (Gambar 1).

Sebaran perkembangan nilai IDM menurut kecamatan menunjukkan bahwa beberapa kecamatan mengalami perubahan dalam klasifikasi wilayah seperti Kecamatan Belida Darat. Pada tahun 2014, Kecamatan Belida masih memiliki 4 desa sangat tertinggal, namun di tahun 2018 semua desa sudah terbebas dari desa sangat tertinggal. Hal yang sama dialami juga oleh hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Tanjung Agung, Rambang Dangku dan Sungai Rotan yang masih menyisakan wilayah sangat tertinggal (Tabel 4). Kecamatan Sungai Rotan

merupakan wilayah terbanyak dalam kategori sangat tertinggal, data tahun 2018 menunjukkan desa-desa yang tergolong sangat tertinggal yaitu 1) Desa Kasai, 2) Desa Tanjung Miring, 3) Desa Sungai Rotan.



Gambar 1. Perkembangan Tipologi Desa di Kabupaten Muara Enim

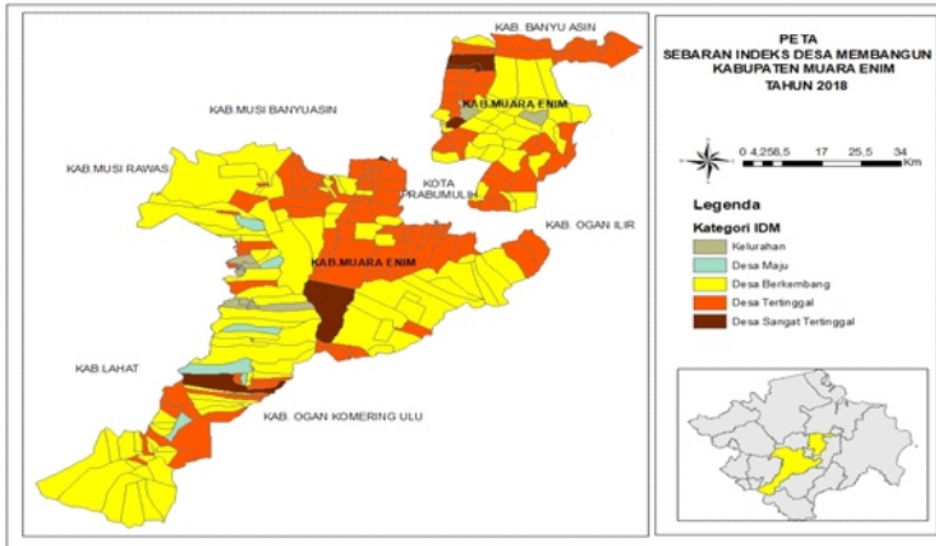
Sumber: Kemendesa PDTT, 2019

No	Kecamatan	ST		Penambahan/Pe ngurangan		T		Penambahan/P engurangan		B		Penambahan/P engurangan		M		Penambahan/P engurangan	
		2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018
1	Tanjung Agung		1	1		16	13	-3		10	10	0		2		2	
2	Muara Enim			0		6	6	6		6	3	-3		4	1	-3	
3	Rambang Dangku	2	2	0		15	20	5		9	4	-5				0	
4	Gunung Megang	2		-2		8	7	-1		3	6	3				0	
5	Gelumbang	1		-1		16	2	-14		5	20	15				0	
6	Lawang Kidul			0				0		4	4	0				0	
7	Semende Darat Laut			0		4	6	2		6	3	-3		1		1	
8	Semende Darat Tengah			0		5	1	-4		7	11	4				0	
9	Semende Darat Ulu	1		-1		9	1	-8		9	9	0				0	
10	Ujan Mas			0		7	2	-5		1	5	4		1		1	
11	Lubai			0		3	3	0		7	7	0				0	
12	Rambang			0		8	11	3		5	2	-3				0	
13	Sungai Rotan	4	3	-1		14	11	-3		1	5	4				0	
14	Lembak	1		-1		5	6	1		4	4	0				0	
15	Berakat			0		2	1	-1		4	5	1				0	
16	Kelekar			0		7	6	-1		1	1	0				0	
17	Muara Belida	1		-1		7	8	1				0				0	
18	Belimbing	2		-2		6	3	-3		2	7	5				0	
19	Belida Darat	4		-4		6	5	-1		5	5	0				0	
20	Lubai Ulu			0		7	3	-4		4	8	4				0	
	TOTAL	18	6	-12		145	115	-30		78	119	41		4	5	1	

Catatan: ST: Sangat Tertinggal; T: Tertinggal; B: Berkembang; M: Maju

Jumlah kecamatan hanya 20 kecamatan, belum termasuk kecamatan pemekaran (Kecamatan Penang Enim, dan Empat Petulai Dangku).

Sumber: Kemendesa (diolah), 2019



Gambar 2 Tipologi Wilayah Desa Menurut Nilai IDM Tahun 2018
 Sumber: UPPM FE Unsri, 2019

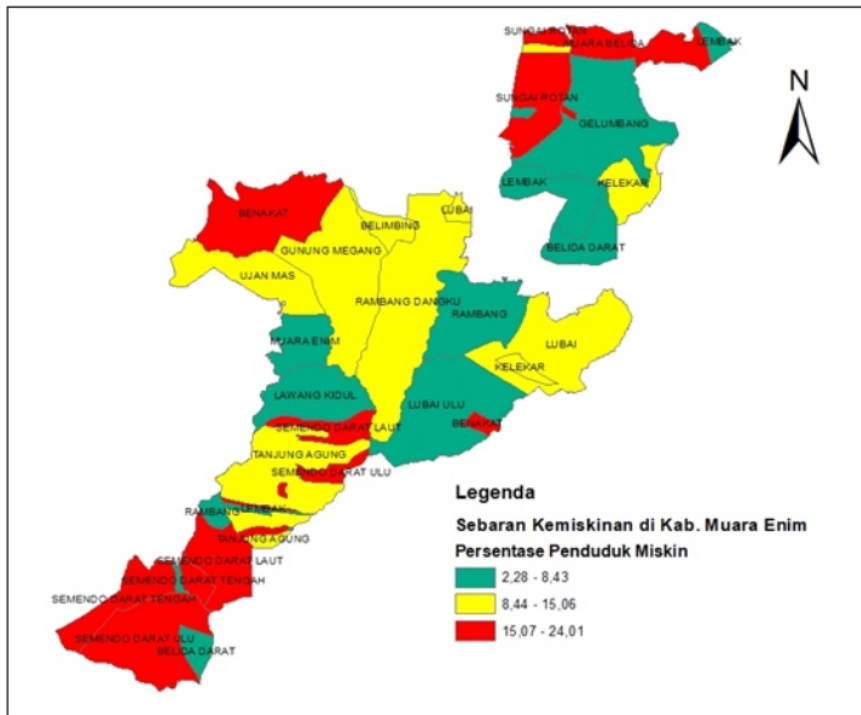
Tipologi desa tertinggal berdasarkan kecamatan juga menunjukkan pengurangan yang bervariasi, kecamatan dengan jumlah pengurangan desa tertinggal tertinggi adalah Kecamatan Gelumbang, bila pada tahun 2014 sebanyak 16 desa terkategori tertinggal namun pada tahun 2018 hanya menyisakan 2 desa tertinggal.

Kondisi yang relatif sama juga terjadi di Kecamatan Semende Darat Ulu yang mampu mengurangi jumlah desa tertinggal sebanyak 8 desa. Akan tetapi, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Muara Enim, Rambang Dangku, Semende Darat Laut dan Rambang justru mengalami peningkatan dalam jumlah desa tertinggal (Tabel 4).

Sementara itu, desa berkembang mengalami peningkatan terbesar yaitu meningkat sebanyak 41 desa dari 78 desa di tahun 2014 menjadi 119 pada tahun 2018. Komposisi desa

berkembang relatif lebih banyak dibandingkan dengan kategori desa yang lainnya. Kecamatan dengan penambahan jumlah desa berkembang terbanyak ditempati Kecamatan Gelumbang yang bertambah sebanyak 15 desa, Kecamatan Semende Darat Ulu sebanyak 9 desa, Semende Darat Tengah dan Ujan Mas masing-masing bertambah sebanyak 4 desa.

Gambar 2 menunjukkan sebaran klasifikasi desa secara spasial menurut wilayah. Data nilai IDM pun mengkonfirmasi penambahan jumlah desa maju di Kabupaten Muara Enim yang bertambah menjadi 5 desa. Adapun desa-desa yang terklasifikasi desa maju di Kabupaten Muara Enim tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Agung (Desa Muara Emil dan Desa Tanjung Bulan), Kecamatan Muara Enim (Desa Saka Jaya), Kecamatan Semende Darat Laut (Desa Pulau Pangung) dan Kecamatan Ujan Mas (Desa Ujan Mas Baru).



Gambar 3. Sebaran Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017

Sumber: UPPM FE Unsri, 2019

B. Karakteristik dan Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

Karakter wilayah perdesaan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti *land use* (penggunaan lahan), Permukiman, dan Sarana dan Prasarana. Penggunaan lahan di perdesaan berkaitan erat dengan kegiatan di sektor pertanian yang sangat dominan. Sementara itu, permukiman dapat dilihat dari tingkat kepadatan dan jenis bangunan Tingkat kepadatan bangunan relatif rendah, dan jenis bangunan biasanya menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan banyak terbuat dari bahan-bahan alam sekitarnya. Sarana dan prasarana perdesaan belum sepenuhnya tersedia seperti sarana transportasi pada sebagian desa masih sedikit, begitu sarana listrik, komunikasi dan sanitasi lingkungan juga sangat terbatas.

Disamping itu, karakter masyarakat perdesaan yang utama adalah kondisi sosial ekonomi rendah dengan mata pencaharian sangat tergantung pada kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha pertanian, peternakan, nelayan,

kerajinan tangan dan pedagang kecil. Selain itu, ukuran dan kepadatan masyarakat relatif kecil, mobilitas masyarakat relatif rendah dan stagnan, solidaritas dan kontrol sosial masyarakat sangat kuat.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 sebesar 12,56 yang tersebar di wilayah 12 kecamatan dan 245 desa. Kecamatan dengan persentase kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Benakat, Kecamatan di Dataran Tinggi seperti Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Laut yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 15%. Wilayah dengan kemiskinan satu digit terdapat di Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak serta Kecamatan Belida Darat (Gambar 3)

Karakteristik wilayah cenderung menjadi faktor alamiah penyebab terjadi kemiskinan.

Kabupaten Muara Enim memiliki topografi yang relatif kompleks seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, implikasinya karakteristik antar wilayah relatif berbeda. Kemiskinan Wilayah Dataran Tinggi (Pegunungan/Bukit) rentan bencana seperti tanah longsor, kondisi topografi yang berbukit menyebabkan wilayah sulit dijangkau akibatnya akses menuju ke dan dari serta antar desa menjadi terhambat. Akses terhadap layanan publik relatif rendah karena biaya yang dikeluarkan lebih besar. Selain itu, Pola pemukiman penduduk di wilayah dataran tinggi cenderung terpencar sehingga menyulitkan untuk melakukan koordinasi. Kondisi ini menyebabkan wilayah-wilayah yang berada di daerah perbukitan menjadi terisolasi dan cenderung menjadi miskin. Wilayah-wilayah yang berada di dataran tinggi seperti kawasan Semende relatif kurang berkembang karena masih terbatasnya akses.

Kemiskinan wilayah perairan juga dicirikan oleh akses terhadap layanan publik rendah, mata pencaharian masyarakat mayoritas nelayan, tergantung pada siklus alam. Rata-rata masyarakat yang hidup di wilayah perairan bermata pencaharian sebagai nelayan, tingkat penghasilan para nelayan sangat tergantung dari kondisi iklim bila musim kemarau tiba para nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Konsekuensinya, sebagian masyarakat berpindah pekerjaan menjadi pekerja paruh waktu guna menafkahi keluarga dengan upah yang relatif rendah. Pola penghidupan (*livelihood*) seperti ini mendorong terjadinya

kemiskinan di wilayah perdesaan.

Karakteristik wilayah seperti telah dijelaskan sebelumnya berasosiasi dengan tingkat kemiskinan, dimana tingkat kemiskinan cenderung berada pada wilayah dengan keterbatasan akses. Dapat dikatakan wilayah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah "normal". Oleh karena itu intervensi pemerintah daerah dapat dilakukan pada wilayah atau kantong-kantong kemiskinan, tidak saja miliki tingkat persentase kemiskinan tinggi tetapi juga jumlah kemiskinan yang tinggi.

Hasil pemetaan pada Gambar 4 menunjukkan prioritas pengentasan kemiskinan, wilayah dengan persentase tinggi dan jumlah penduduk miskin terbanyak merupakan prioritas utama. Wilayah tersebut terdiri atas Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan SDU, Kecamatan Belimbing dan Tanjung Agung. Sementara itu, prioritas kedua adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan jumlah penduduk yang rendah yaitu Kecamatan SDL, Kecamatan SDT, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Benakat dan Kecamatan Kelekar.

Prioritas ketiga, tingkat kemiskinan rendah dan jumlah penduduk miskin tinggi yaitu Kecamatan Rambang Dangku. Prioritas keempat, wilayah dengan tingkat dan jumlah kemiskinan rendah yang terdiri atas: Kecamatan Muara Enim, Lubai Ulu, Lubai, Ujan Mas, Rambang, Gelumbang, Lembak, Lawang Kidul, dan Belida Darat.



Gambar 4 Prioritas Wilayah Miskin di Kabupaten Muara Enim

Sumber: UPPM FE Unsri, 2019

Keberhasilan prioritas wilayah sasaran kemiskinan tidak terlepas dari aspek pendanaan, oleh karena itu 5 tahun terakhir pemerintah pusat melakukan transfer dana ke wilayah sasaran melalui dana desa.

B.1. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks, hal ini tercermin dari akar penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara teoritis merupakan lingkaran yang sulit untuk diputus. Berikut dijelaskan faktor penyebab kemiskinan:

1. Penurunan harga komoditas hasil pertanian perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Komoditas hasil perkebunan tersebut merupakan tempat mengantungkan hidup bagi lebih dari 2/3 masyarakat kabupaten Muara Enim. Ketika harga komoditas turun berdampak pada tergerusnya daya beli masyarakat dan berujung pada berkurangnya konsumsi masyarakat.
2. Adanya fenomena *brain drain*, orang-orang berkualitas atau produktif bermigrasi ke wilayah lain sehingga penduduk desa dihuni angkatan kerja tua dan kurang berpendidikan. Dampaknya produktivitas, kreativitas dan inovasi kurang optimal. Sebagian besar masyarakat bersifat "pasrah", konsekuensi masyarakat menjadi *subsisten*.
3. Sifat konsumtif masyarakat, publikasi TNP2K menyatakan konsumsi makan memberikan kontribusi yang besar (70,93%) terhadap kemiskinan. Konsumsi rokok di perdesaa memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah besar dengan persentase 13,78%.

C. Distribusi dan Pengalokasian Dana Desa Secara Spasial di Kabupaten Muara Enim

Distribusi dan pengalokasi dana desa sudah secara jelas diatur oleh pemerintah pusat setiap tahun sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan.

Merujuk pada Permendesa PDT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Permendesa tersebut menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas

penggunaan dana desa pada periode 2015-2017 relatif sama yaitu untuk mendorong konektivitas antar wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar dengan pembangunan fisik seperti jalan desa, gorong-gorong, MCK, Sumur Bor. Secara rinci penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Desa
 - a. Lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase dan tempat pembuangan sampah.
 - b. Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
 - c. Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik, dan
 - d. Informasi dan komunikasi antara lain, jaringan internet, telepon umum, dan website desa.
2. Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar
 - a. Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu, polindes
 - b. Pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa.
3. Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa
 - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain, embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang temak.
 - b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain lumbung desa, *cold storage*, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.
4. Sarana dan Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - b. Penanganan bencana alam
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya, dan
 - d. Pelestarian lingkungan hidup
5. Sarana dan Prasarana lainnya
Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 merujuk pada Peraturan Menteri Desa 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

tahun 2018, pada Bab 3 Pasal 4 dinyatakan bahwa penggunaan Dana Desa mencakup lima hal yaitu:

1. Penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pembangunan.
2. Penggunaan Dana Desa difokuskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan program yang bersifat lintas bidang.
3. Kegiatan dan Program yang dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan yaitu, BUMDesa atau BUMDesa bersama.
4. Penggunaan Dana Desa yang dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan atau di paparkan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa.
5. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa telah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, mengutamakan kepentingan dan hak seluruh warga desa tanpa terkecuali;
2. Kebutuhan kepentingan prioritas, dengan mendahulukan desa yang lebih mendesak dan berhubungan dengan kepentingan sebagian masyarakat desa;
3. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan lokal yang berskala desa serta hak asal usul;
4. Partisipatif, mengutamakan kreativitas masyarakat;
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu mengutamakan pendayagunaan sumberdaya alam desa dan pelaksanaan secara mandiri, dengan mengutamakan pikiran, tenaga dan keterampilan warga desa serta kearifan lokal nya; dan
6. Tipologi desa, yaitu dengan mempertimbangkan keadaan karakteristik geografis, antropologis, sosiologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan status perkembangan kemajuan desa.

Penetapan penggunaan Dana Desa didasarkan pada:

- a. Kemanfaatan, artinya penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mendesak dilaksanakan serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar kepentingan masyarakat desa.
- b. Partisipasi masyarakat, perlibatan masyarakat menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Tanpa adanya dukungan dari sebagian besar masyarakat program kegiatan sulit untuk dijalankan.
- c. Keberlanjutan, memiliki rencana untuk mengelola melalui pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
- d. Kepastian pengawasan artinya masyarakat desa harus memiliki peluang sebesarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa serta kegiatannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- e. Sumber daya dan tipologi desa, hal ini bermakna setiap daerah memiliki keunikan atau adanya heterogenitas wilayah. Dinamika wilayah yang cepat berubah harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas kegiatan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat. Secara jelas, penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
3. Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa
4. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
5. Dukungan permodalan pengelolaan usaha

ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.

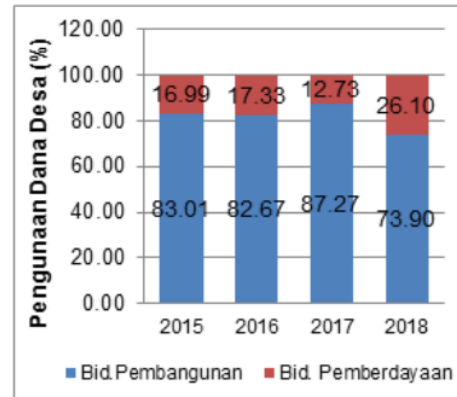
6. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
7. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Hasil penelitian kajian menunjukkan penggunaan Dana desa di Kabupaten Muara Enim telah merujuk pada permen yang ditetapkan. Secara umum tren peruntukan Dana desa untuk kegiatan fisik mulai berkurang dan alokasi bidang pemberdayaan terlihat meningkat. Pada tahun 2015 alokasi dana desa untuk bidang pembangunan sebesar 83,01% sedangkan alokasi dana desa untuk bidang pemberdayaan sebesar 16,99%. Memasuki tahun 2018, komposisi penggunaan Dana memiliki kecenderungan ke arah pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan pengetahuan kemampuan masyarakat, peningkatan keterampilan, peningkatan kesempatan kerja. Komparasi persentase penggunaan dana desa tahun 2018, sebesar 73,90 persen untuk kegiatan fisik dan sebesar 26,10 persen untuk pemberdayaan masyarakat (Gambar 5).

Penggunaan dana desa pada tingkat kecamatan menunjukkan wilayah yang mengalokasikan Dana desa terbesar untuk pembangunan kegiatan fisik pada tahun 2015 yaitu Kecamatan Benakat sebesar 96,15% dan Rambang sebesar 92,03% sedangkan alokasi terkecil ditempati Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Tanjung Agung dengan alokasi masing-masing sebesar 77,84% dan 78,78%. Kedua kecamatan ini merupakan daerah penyangga dan ibukota kabupaten sehingga keberadaan infrastruktur terutama untuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bidang sosial.

Alokasi Dana desa pada tahun 2018 menunjukkan komposisi yang relatif berimbang untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Belimbing dan Kecamatan Belida Darat. Penggunaan dana desa untuk pembangunan masing-masing sebesar 51,21 persen dan 54,26 persen dan selebihnya digunakan untuk pemberdayaan. Penggunaan Dana untuk

pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan.



Gambar 5. Komposisi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Muara Enim

Sumber : DPMD Kabupaten Muara Enim (diolah), 2019

D. Dampak Dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

Dana desa yang telah dikucurkan dari 2015-2018 semakin meningkat, namun tingkat kemiskinan menurun relatif lambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi kemiskinan mampu dijelaskan oleh dana desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 14,49 persen sementara sisanya ditentukan oleh faktor lainnya.

Secara spasial terlihat bahwa variasi kemiskinan di wilayah Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Rotan, Kelekar, Belida Darat, Muara Belida ditentukan oleh Dana desa relatif kecil dibandingkan dengan wilayah lainnya. Koefisien determinasi untuk wilayah Gelumbang dan sekitarnya tidak lebih dari 5%.

Relatif kecilnya pengaruh Dana desa terhadap pengurangan kemiskinan disebabkan oleh adanya sumber anggaran lain yaitu alokasi Dana desa, bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten, Dana CSR. Selain itu, pemerintah melakukan program keluarga harapan (PKH), rumah tidak layak huni (RTLH), kelompok usaha bersama (KUBE), Rastra (bantuan pangan non-

tunai), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia sehat, BOS, dan Kredit Usaha Rakyat.

Sementara itu, keragaman kemiskinan yang mampu dijelaskan oleh dana desa bidang pembangunan dan pemberdayaan untuk wilayah Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan di wilayah Semende berkisar antara 11,8 sampai dengan 29,0% (Gambar 6). Kondisi ini bermakna bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan Dana desa dalam mengurangi kemiskinan namun perlu mendorong beberapa variabel yang mampu mengurangi kemiskinan.

Dana desa tidak hanya memiliki kecenderungan menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan tetapi juga di wilayah kelurahan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh spasial antar wilayah yang berdekatan. Penggunaan metode GWR mampu menangkap adanya gejala depensi antar wilayah, dimana wilayah yang letaknya berdekatan akan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan wilayah yang letaknya jauh. Hal ini bermakna

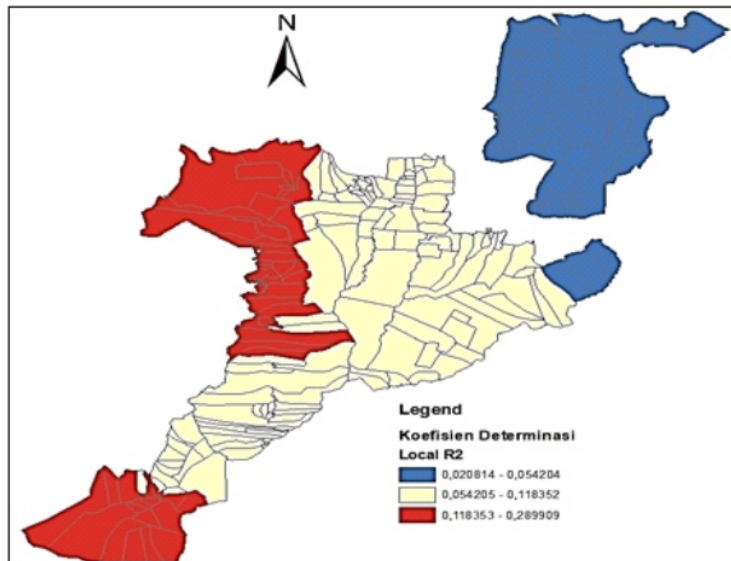
bahwa semakin dekat jarak suatu wilayah pengaruhnya semakin kuat dan sebaliknya semakin jauh pengaruhnya semakin lemah.

Dana desa bidang pembangunan memiliki kecenderungan menurunkan tingkat kemiskinan di 36 desa/kelurahan (14,12%) yang tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah 1) Kecamatan Benakat (Desa Betung); 2) Kecamatan Gelumbang (Desa Betis, Kelurahan Gelumbang, Gumai, Karang Endah, Karang Endah Selatan, Kerta Mulia, Midar, Paya Bakal, Pinang Banjar, Putak, Sebau, Segayam, Sigam, Suka Jaya, Suka Menang, Talang Taling, Tambang Kelekar, Teluk Limau); 3) Kecamatan Kelekar (Desa Embacang Kelekar, Desa Menanti, Desa Menanti Selatan, Desa Pelempang, Desa Suban Baru, Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Jaya); 4) Kecamatan Belida Darat (Desa Gaung Asam); 5) Kecamatan Lembak (Desa Lubuk Enau); 6) Kecamatan Muara Belida (Desa Arisan Musi, Arisan Musi Timur, Gedung Buruk, Harapan Mulya, Kayu Ara Baru, Mulia Abadi, Patra Tani); 7) Kecamatan Sungai Rotan (Desa Paya Angus).

Tabel 5. Alokasi Dana Desa Menurut Kecamatan di Kab. Muara Enim, 2015-2018

Kecamatan	2015		2016		2017		2018		Rata-Rata 2015-2018	
	PPD	PMD	PPD	PMD	PPD	PMD	PPD	PMD	PPD	PMD
Tanjung Agung	78,78	21,22	84,34	15,66	90,41	9,59	80,28	19,72	83,45	16,55
Muara Enim	77,84	22,16	91,77	8,23	82,14	17,86	86,45	13,55	84,55	15,45
Rambang Dangku	82,65	17,35	84,22	15,78	89,12	10,88	75,69	24,31	82,92	17,08
Gunung Megang	82,75	17,25	83,32	16,68	86,32	13,68	71,28	28,72	80,92	19,08
Gelumbang	80,68	19,32	73,27	26,73	91,33	8,67	65,65	34,35	77,73	22,27
Lawang Kidul	79,57	20,43	78,34	21,66	68,43	31,57	79,19	20,81	76,38	23,62
Semende Darat Laut	82,82	17,18	80,61	19,39	88,78	11,22	77,93	22,07	82,54	17,46
Semende Darat Tengah	80,84	19,16	83,16	16,84	93,94	6,06	73,72	26,28	82,91	17,09
Semende Darat Ulu	79,84	20,16	82,56	17,44	84,74	15,26	89,75	10,25	84,22	15,78
Ujan Mas	88,45	11,55	90,15	9,85	93,17	6,83	67,26	32,74	84,76	15,24
Lubai	89,64	10,36	92,58	7,42	85,17	14,83	83,32	16,68	87,68	12,32
Rambang	92,03	7,97	80,20	19,80	81,76	18,24	75,58	24,42	82,39	17,61
Sungai Rotan	81,10	18,90	86,26	13,74	90,07	9,93	70,49	29,51	81,98	18,02
Lembak	84,41	15,59	80,79	19,21	93,79	6,21	81,15	18,85	85,04	14,96
Benakat	96,15	3,85	88,82	11,18	83,97	16,03	67,24	32,76	84,05	15,95
Kelekar	91,78	8,22	83,08	16,92	86,93	13,07	72,07	27,93	83,47	16,53
Muara Belida	90,99	9,01	70,40	29,60	76,80	23,20	80,54	19,46	79,68	20,32
Belimbing	82,40	17,60	79,13	20,87	88,61	11,39	51,21	48,79	75,34	24,66
Belida Darat	96,19	3,81	83,57	16,43	75,07	24,93	54,26	45,74	77,27	22,73
Lubai Ulu	81,86	18,14	81,16	18,84	85,47	14,53	77,51	22,49	81,50	18,50

Sumber: DPMD Kabupaten Muara Enim, 2019



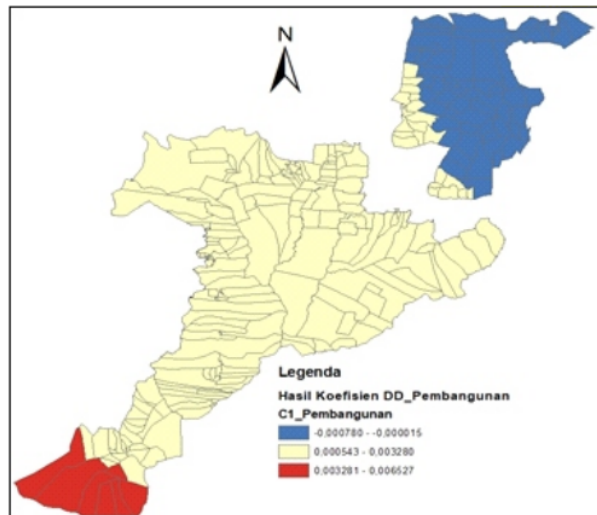
Gambar 6. Sebaran Koefisien Determinasi
Sumber: DPMD Kabupaten Muara Enim (diolah), 2019

Koefisien regresi dana desa bidang pembangunan untuk ke 36 desa tersebut bervariasi mulai dari -0,00015 sampai dengan -0,000780. Sementara itu, desa-desa lain belum memiliki kecenderungan untuk menurunkan kemiskinan (Gambar 7).

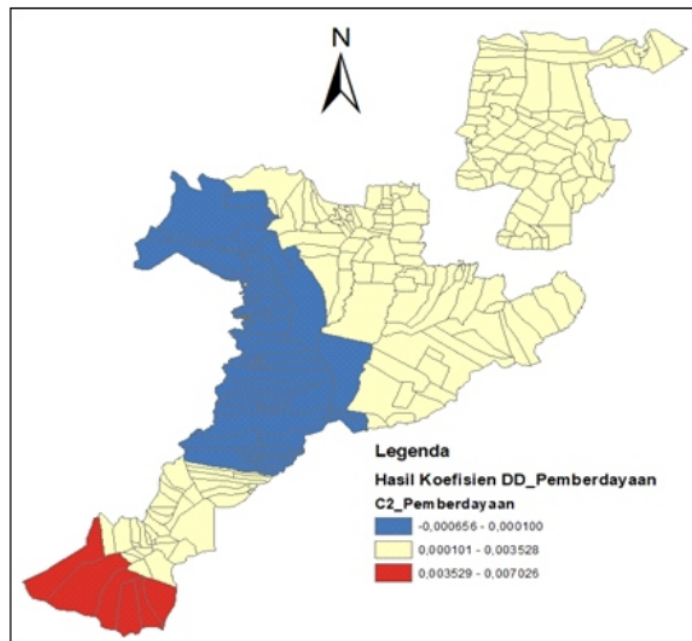
Dana desa yang belum optimal dalam mengurangi kemiskinan disebabkan oleh: 1) alokasi dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, MCK, Air bersih, pembangun PAUD berdampak dalam jangka panjang, 2) basis data terpadu yang dimiliki masih terdapat kelemahan sehingga program yang dilakukan terindikasi masih ada yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, sinergitas antar *stakeholder* dalam mengurangi kemiskinan perlu dilakukan.

Hasil kajian seperti ditunjukkan Gambar 8 secara eksplisit dana desa bidang pemberdayaan memiliki kecenderungan menurunkan kemiskinan di 48 atau sebesar 18,82% desa/kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan yaitu 1) Kecamatan Benakat (Desa Hidup baru, Desa Padang Bindu, Desa Pagar Dewa); 2) Kecamatan Gunung Megang (Desa Bangun Sari, Desa Panang Jaya,

Desa Penanggiran); 3) Kecamatan Lawang Kidul (Desa Darmo, Desa Keban Agung, Desa Lingga, Desa Lingga, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Desa Tegal Rejo); 4) Kecamatan Muara Enim (Kelurahan Air Lintang, Desa Harapan Jaya, Desa Karang Raja, Desa Kepur, Desa Lubuk Ampelas, Kelurahan Muara Enim, Desa Muara Harapan, Desa Muara Lawai, Kelurahan Pasar I, Kelurahan Pasar II, Kelurahan Pasar III, Desa Saka Jaya, Desa Tanjung Jati, Desa Tanjung Raja, Desa Tanjung Serian, Kelurahan Tungkal); 5) Kecamatan Tanjung Agung (Desa Lesung Batu, Desa Matas, Desa Muara Emil, Desa Paduraksa, Desa Tanjung Bulan, Desa Tanjung Karangan, Desa Tanjung Lalang, Desa Seleman); 6) Kecamatan Semendo Darat Laut (Desa Penyandingan, Desa Pulau Panggung); 7) Kecamatan Semende Darat Ulu (Desa Tanjung Agung), 8) Kecamatan Ujan Mas (Desa Guci, Desa Muara Gula Baru, Desa Muara Gula Lama, Desa Pinang Belarik, Desa Tanjung Raman, Desa Ujan Mas Baru, Desa Ujan Mas Lama, Desa Ulak Bandung).



Gambar 7. Sebaran Koefisien Dana Desa Bidang Pembangunan
Sumber: DPMD Kabupaten Muara Enim (diolah), 2019

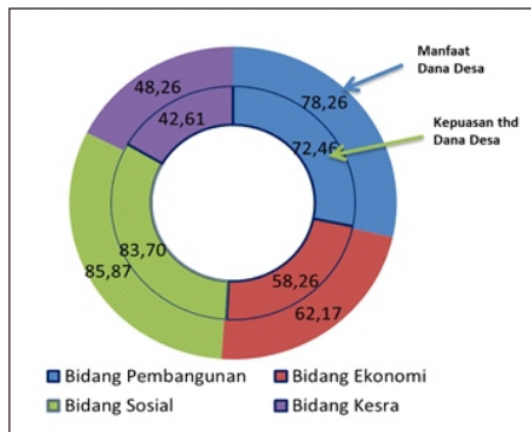


Gambar 8. Sebaran Koefisien Dana Desa Bidang Pemberdayaan
Sumber: DPMD Kabupaten Muara Enim (diolah), 2019

E. Manfaat Dana Desa terhadap Masyarakat

Penetapan penggunaan Dana desa salah satunya harus memperhatikan aspek manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kajian ini secara spesifik melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan dan manfaat Dana desa. Hasil studi menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan terbesar di bidang pembangunan sosial dengan nilai rata-rata sebesar 83,70%, disusul kegiatan bidang pembangunan fisik sebesar 72,46%, bidang ekonomi dan kesra masing-masing sebesar 58,28% dan 42,61% (Gambar 9) Relatif rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi dan kesra erat kaitan dengan prioritas dana desa memang diperuntukkan untuk pembangunan sarana yang ada di wilayah desa.

Kajian ini menemukan, masyarakat merasa adanya Dana desa telah mendorong “bangkitnya” rasa gotong-royong, komunikasi antar warga dan kualitas layanan kesehatan serta akses pendidikan lebih baik sehingga masyarakat merasa puas terhadap pembangunan bidang sosial. Dilihat dari sisi manfaat, pembangunan bidang sosial dinilai sebagian besar masyarakat (85,87%) sangat telah dirasakan manfaatnya, bidang pembangunan sebesar 78,26% bidang ekonomi (62,17%) dan bidang kesra sebesar 48,26% (Gambar 9)



Gambar 9. Tingkat Kepuasan dan Manfaat Dana Desa menurut Persepsi Masyarakat
Sumber: data lapang (diolah), 2019

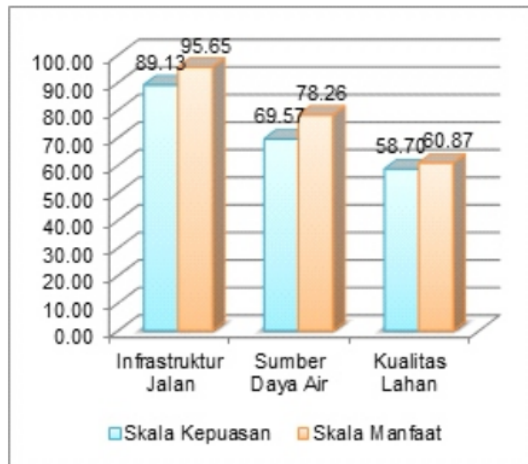
Tingkat kepuasan dan manfaat masing-masing bidang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan, sumber daya air dan perbaikan kualitas lahan relatif puas. Masyarakat yang menyatakan puas terhadap pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 89,13% dan mengganggu infrastruktur jalan bermanfaat sebanyak 95,65% (Gambar 4.10). Dengan demikian pembangunan infrastruktur jalan (jalan desa, jalan setapak ketempat pemandian, gorong-gorong, dan Selokan) sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pembangunan jalan desa, masyarakat di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang sebelum dibangun jalan desa dan jalan setapak sangat kesulitan untuk membawa hasil produksi pertanian karena ketika musim penghujan tiba jalan tidak bisa dilewati sehingga hasil panen tidak dapat langsung dijual dan berdampak pada pendapatan masyarakat. Adanya jalan desa mendorong terjadinya efisiensi waktu karena jarak tempuh menjadi lebih singkat.

Hal yang sama juga dialami masyarakat Desa Kencana Mulia, sebelum adanya pembangunan jalan desa masyarakat yang mayoritas petani pekebun sangat kesulitan membawa perkebunan. Pembangunan jalan desa telah membuka akses menuju ke kecamatan demikian juga sebaliknya.

Pembangunan sumur bor untuk penyediaan air bersih dan PAMSIMAS sangat bermanfaat bagi masyarakat, hal ini tercermin dari 78,26% masyarakat merasa puas. Sebelum adanya sumur bor dan PAMSIMAS masyarakat di Desa Gumai memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih dengan risiko mudah terserang penyakit. Dibangunnya air sumur bor secara tidak langsung telah mampu mereduksi biaya kesehatan masyarakat.



Gambar 10. Tingkat Kepuasan dan Manfaat Dana Desa Bidang Pembangunan menurut Persepsi Masyarakat

Sumber: datang lapang (diolah), 2019

2). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu akses sarana produksi, memperbaiki jaringan konsumen, akses pasar, BUMDesa dan perbaikan lembaga ekonomi. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses sarana produksi sebesar 67,39% dan akses pasar sebesar 63,04%. Diketahui salah satu ciri dari masyarakat desa tertinggal adalah sebagian mereka melakukan transaksi dalam desa (perekonomian tertutup). Pembangunan pasar desa tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa namun juga ada *income multiplicationi* bagi desa. Aktivitas pasar telah mendorong penambahan pendapatan bagi masyarakat sebagai penyedia input dan juga terhadap sumber pendapatan bagi desa. Kontribusi lainnya adalah perbaikan akses jalan (perbaikan jalan desa) telah mendorong lancarnya aktivitas warga masyarakat.

Sementara itu, kepuasan terhadap perbaikan jaringan konsumen, BUMDesa dan lembaga ekonomi masih relatif rendah. BUMDesa yang ada belum secara optimal difungsikan sehingga belum memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat terutama bila dikaitkan dengan aspek

kesejahteraan. BUMDesa belum sepenuhnya bisa berinovasi, hal ini terlihat dari usaha yang dilakukan BUMDesa seperti usaha penyewaan tenda/kursi, organ tunggal dan usaha peternakan. Ke depan BUMDesa didorong untuk melakukan inovasi dengan melakukan kerjasama antar BUMDesa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Oleh karena permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar BUMDesa seperti masih minimnya SDM yang mengelola BUMDesa harus dituntaskan. Fakta di lapangan menunjukkan manajerial BUMDesa sebagian besar dikelola secara sederhana karena terbatasnya SDM di desa. Tenaga muda yang profesional dan memiliki jiwa wirausaha lebih cenderung untuk beraktivitas di luar desa, akibatnya pemerintah desa kesulitan mencari orang-orang yang mau mengurus BUMDes.

Masalah lainnya adalah pemerintah desa sendiri masih sulit untuk menemukan potensi desa sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung "meniru" aktivitas desa lainnya. Keberadaan BUMDesa harus bersinergi dengan semua stakeholder sehingga BUMDesa dapat berkembang.

Hasil penelitian juga menunjukkan akses sarana produksi dinilai bermanfaat, hal ini tergambar dari sebesar 71,74 % (Gambar 11) jawaban masyarakat dan akses pasar juga memiliki tingkat manfaat yang relatif besar. Disisi lain, peran BUMDesa yang belum optimal bahkan cenderung belum beroperasi dianggap sehingga belum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

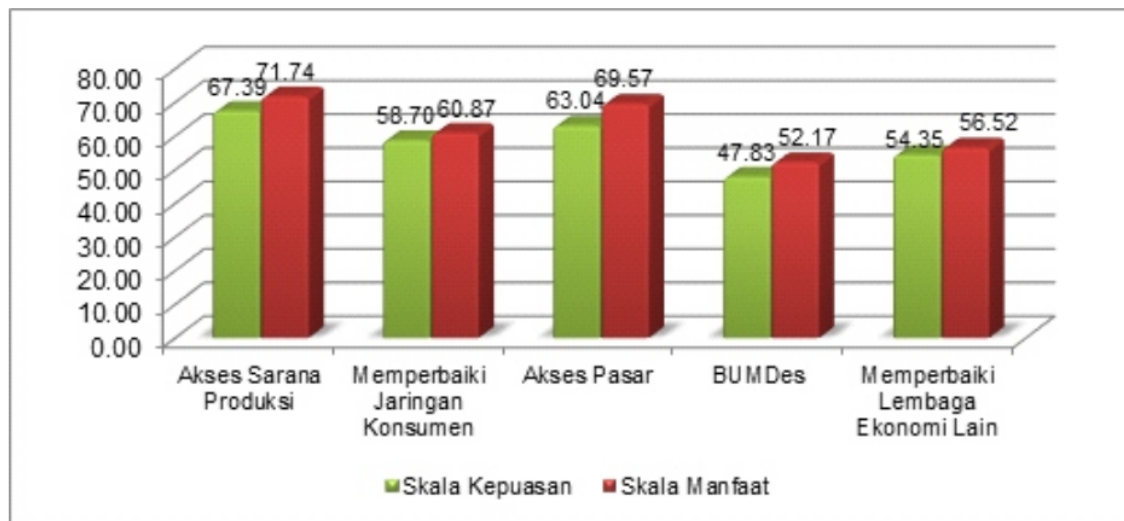
3). Tingkat kepuasan pada pembangunan bidang sosial sangat tinggi, hal ini terlihat dari persepsi masyarakat yang menilai adanya Dana desa telah mendorong gotong royong, meningkatnya komunikasi antar warga, peningkatan kualitas kesehatan dan akses pendidikan. Dana desa memberikan manfaat dalam hal gotong-royong (86,96%) dan komunikasi antara warga (95,65%). Kegiatan yang danai dari Dana desa bersifat padat karya dan swadaya masyarakat sehingga dalam proses pembangunan masyarakat dilibatkan berpartisipasi sehingga terjalin komunikasi antar warga desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan berdampak positif bagi pengembangan wilayah karena masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan.

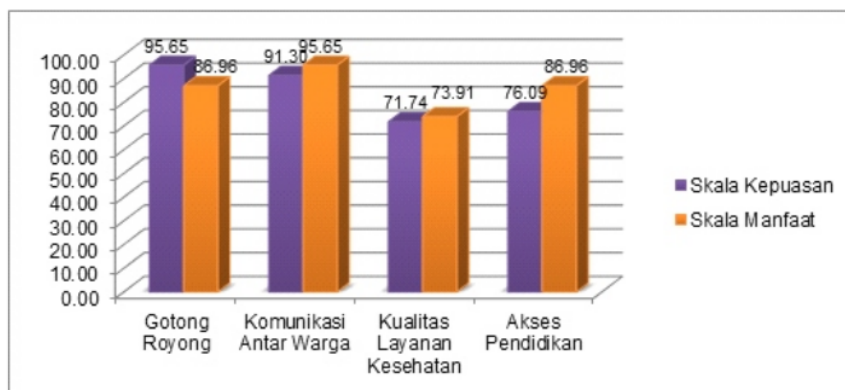
Penggunaan Dana desa telah meningkatkan kualitas layanan pendidikan, adanya Posyandu dan Postu telah mampu mendorong peningkatan layanan kesehatan di desa. Demikian juga pendirian PAUD sebagai wadah bermain anak-anak memberikan mafaat terhadap masyarakat yang selama ini harus mengantar anak bersekolah di desa tetangga. Ketika mengantar anak ke sekolah ada biaya *riil* dan *opportunity cost* yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga. Pembangunan PAUD secara eksplisit mampu menurunkan biaya bagi masyarakat. Sebelum adanya PAUD diperlukan biaya transportasi dan curahan waktu yang lebih lama, artinya dapat dikatakan pembangunan desa dan sosial dasar PAUD memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara kuantifikasi, manfaat tersebut terlihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan PAUD, sebanyak 676,09% responden

menyatakan puas dan 86,96% menyatakan PAUD sangat bermanfaat.

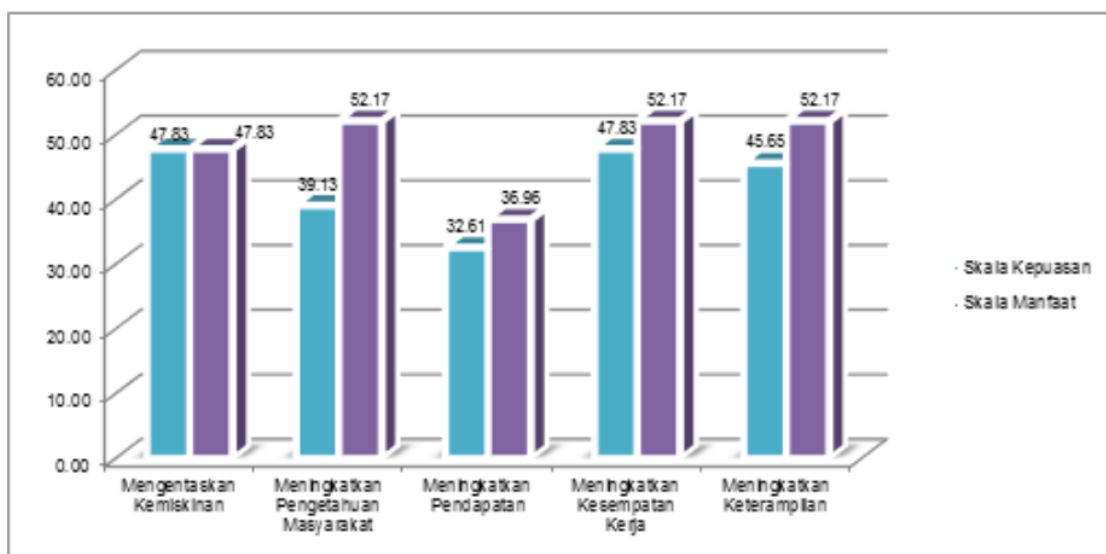
- 4) Kepuasan dan manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap pembangunan Bidang Kesra relatif masih rendah, hal ini terlihat dari respon masyarakat maksimum 50% baik kepuasan dan manfaat. Dana desa dialokasikan dirasakan masyarakat belum optimal dalam mengurangi kemiskinan dan juga belum optimal dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Dapat dipahami bahwa kemiskinan dan pendapat merupakan dampak akhir dari penggunaan Dana desa, selama 5 tahun Dana desa dipergunakan untuk pembangunan sarana terutama infrastruktur di desa. Pengaruh pembangunan bidang infrastruktur dinyakini akan memberikan dampak jangka panjang. Data empirik ini mengkonfirmasi hasil perhitungan sebelumnya yang menyatakan bahwa Dana desa bidang pembangunan memiliki kecenderungan menurunkan kemiskinan.



Gambar 11. Tingkat Kepuasan dan Manfaat Dana Desa Bidang Ekonomi menurut Persepsi Masyarakat (Sumber: datang lapang, diolah 2019)



Gambar 12. Tingkat Kepuasan dan Manfaat Dana Desa Bidang Sosial menurut Persepsi Masyarakat (Sumber: datang lapang, diolah 2019)



Gambar 13. Tingkat Kepuasan dan Manfaat Dana Desa Bidang Kesejahteraan Masyarakat menurut Persepsi Masyarakat (Sumber: datang lapang, diolah 2019)

F. Impelementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Hasil kajian menunjukkan Dana desa belum optimal dalam mengurangi tingkat kemiskinan oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke depan membuat kebijakan teknis terutama penyediaan sarana dan bantuan pemenuhan kebutuhan dsar minimum bagi masyarakat. Intervensi dapat dilakukan melalui:

1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga: Upaya-upaya yang dilakukan yaitu: penguatan, penumbuhkembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala UMK melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Berkerjasama dengan pihak perbankan untuk meningkatkan akses permodalan melalui skim kredit lunak bagi kelompok usaha bersama, usaha mikro/kecil
2. Peningkatan dan penyediaan layanan dasar pendidikan melalui jaminan pendidikan daerah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTS dan
3. Peningkatan Pelayanan dasar: keterpenuhan permukiman dan layak huni; pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang bagi desa-desa yang sangat tertinggal dan tertinggal.
4. Perlindungan sosial yang komprehensif: pemenuhan hak atas pangan, layanan kesehatan, pendidikan, haka atas tanah
5. Pengembangan wilayah melalui pengembangan kantong kemiskinan, percepatan pembangunan perdesaan serta pembangunan daerah sangat tertinggal dan tertinggal.

4. KESIMPULAN

Wilayah yang memiliki jumlah dan persentase kemiskinan yang tinggi adalah Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan SDU, Kecamatan Belimbing dan Tanjung Agung. Kecamatan yang memiliki persentase kemiskinan tinggidan jumlah penduduk miskin yang sedikit berada di Kecamatan SDL, Kecamatan SDT, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Benakat dan Kecamatan Kelekar. Wilayah dengan jumlah kemiskinan yang tinggi dan persentase miskin

rendah terdapat di Kecamatan Rambang Dangku, dan wilayah dengan jumlah dan tingkat kemiskinan yang rendah adalah Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Rambang, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Belida Darat.

Karakteristik kemiskinan yang diklasifikasikan berdasarkan topografi wilayah menunjukkan kemiskinan di wilayah perbukitan disebabkan oleh akses wilayah yang relatif sulit dan pemukiman yang relatif terpencar, sementara itu di wilayah dataran rendah (rawa) mata pencaharian sangat tergantung dengan alam, akses yang relatif sulit dan kurang tersedianya air bersih serta sanitasi lingkungan yang kurang.

Tipologi desa sangat tertinggal pada mengalami penurunan dari (7,35%) pada tahun 2014 menjadi (2,45%) pada tahun 2018, dan desa tertinggal menurun dari (59,18%) menjadi (46,94%) pada periode yang sama. Di sisi lain, desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 16,73% (dari 31,84% menjadi 48,57%), sementara itu desa maju meningkat dari 1,63% menjadi 2,04%. Secara spasial, pengurangan desa tertinggal terbanyak terjadi di Kecamatan Gelumbang bila tahun 2014 memiliki 16 desa tertinggal dan pada tahun 2014 hanya menyisakan dua desa tertinggal. Kondisi yang relatif sama dialami Kecamatan Semendo Darat Ulu yang mampu mengurangi desa tertinggal sebanyak 8 desa dari 9 desa menjadi hanya 1 desa.

Alokasi dana desa secara umum selama 2015-2017 digunakan untuk bidang pembangunan dengan persentase diatas 80%, namun pada tahun 2018 persentase penggunaan untuk bidang pembangunanfisik menurun menjadi 73,90 persen. Sementara alokasi untuk pemberdayaan meningkat dari 16,99 persen di tahun 2015 menjadi 26,10 persen pada tahun 2018. Dilihat per wilayah kecamatan, Kecamatan Benakat merupakan wilayah yang mengolasikan dana desa untuk bidang pembangunan terbesar yaitu sebesar 96,15 persen dan Rambang sebesar 92,03 persen sedangkan alokasi terkecil ditempati Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Tanjung Agung dengan alokasi masing-masing sebesar 77,84 persen dan 78,78 persen.

Analisis spasial menunjukkan bahwa pengaruh Dana desa terhadap kemiskinan di setiap desa sangat bervariasi. Kondisi tersebut menguatkan argumen bahwa kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya bersifat asimetris. Hal ini tergambar dari hasil kajian yang menunjukkan bahwa Dana desa bidang pembangunan memiliki kecenderungan menurunkan kemiskinan di 14,12 persen desa yang tersebar di 7 kecamatan (hampir semua kecamatan berada di sekitar wilayah Kecamatan Gelumbang). Dana desa bidang pemberdayaan dapat menurunkan kemiskinan di (18,82%) desa/kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan. Pengaruh dana desa bidang pemberdayaan lebih besar secara spasial terjadi wilayah yang telah memiliki infrastruktur yang relatif mantap, seperti Kecamatan Lawang Kidul, Gunung Megang, Muara Enim dan Tanjung Agung.

Relatif kecilnya pengaruh Dana desa terhadap pengurangan kemiskinan disebabkan oleh adanya sumber anggaran lain yaitu alokasi dana desa, bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten, dana CSR. Selain itu, pemerintah melakukan program keluarga harapan (PKH), rumah tidak layak huni (RTLH), kelompok usaha bersama (KUBE), Rastra (bantuan pangan non-tunai), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia sehat, BOS, dan Kredit Usaha Rakyat.

Penetapan penggunaan dana desa salah satunya harus memperhatikan aspek manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tingkat kepuasan tertinggi masyarakat bidang pembangunan sosial dengan nilai rata-rata sebesar 83,70% dan menganggap pembangunan bidang sosial bermanfaat sebanyak 85,87%, disusul kegiatan bidang pembangunan fisik sebesar (72,46%) dengan kebermanfaatannya sebesar (78,26%), bidang ekonomi dan kesra masing-masing sebesar (58,28%) dan (42,61%). Masyarakat menganggap kedua bidang tersebut bermanfaat sebanyak (62,17%) dan (28,26%).

Manfaat dana desa bila dirinci menurut dimensi dalam masing-masing bidang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi terhadap pembangunan bidang infrastruktur (jalan, jembatan, selokan, PAMSIMAS, Sumur Bor) sebanyak 89,13% dan

menganggap infrastruktur jalan bermanfaat sebanyak 95,65%. Selain itu, penggunaan Dana desa telah mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

REKOMENDASI

1. Pemerintah pada aras terbawah (kepala desa) sebaiknya memfokuskan penggunaan dana desa untuk kegiatan ekonomi seperti optimalisasi BUMDesa dan peningkatan ekonomi lokal melalui pengembangan wisata desa.
2. Pemerintah daerah mendorong inovasi desa melalui BUMDesa dengan memanfaatkan Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa.
3. Pemerintah daerah memfokuskan pengentasan kemiskinan pada wilayah yang memiliki jumlah dan persentase kemiskinan tinggi dengan melakukan program tematik kemiskinan. Dimulai dari penganggaran untuk kemiskinan di masing-masing OPD yang terintegrasi dengan Rencana Aksi Daerah.
4. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk menuntaskan kemiskinan di wilayah perbatasan wilayah kabupaten.
5. Optimalisasi pendamping lokal desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana desa.
6. Optimalisasi program-program pelayanan dasar seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan perbaikan data base agar tidak tumpang tindih.
7. Perlu adanya *political will* dengan mendorong penataan perkuatan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.
8. Perlu perluasan sampel dalam penelitian terutama desa-desa yang relatif sangat terisolir agar potret kebermanfaatannya Dana desa dapat tergambar secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Siful Muhammad. Bukhori, Achmad Aditama. 2018. Apakah Dana Desa Berdampak pada Penurunan Kemiskinan dan Meningkatkan Praktek Pemerintahan yang baik?. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Universitas Jember.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Badan Pusat Statistik tahun. 2017. Sumsel.
- Badan Pusat Statistik 2018. Muara Enim Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Muara Enim
- Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Muara Enim 2019.
- Indikator Kesejahteraan Rakat Muara Enim 2017.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2019.

Studi Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unibba.ac.id Internet Source	1%
2	djpb.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
3	web.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
4	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	1%
5	bpmpd.bogorkab.go.id Internet Source	1%
6	id.wiktionary.org Internet Source	1%
7	repository.unikom.ac.id Internet Source	1%
8	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%

10	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	1 %
12	doc-pak.undip.ac.id Internet Source	1 %
13	www.appptma.org Internet Source	1 %
14	id.wikipedia.org Internet Source	1 %
15	wahjudinsumpeno.files.wordpress.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off